



ANALISIS KOMPRATIF UMKM DI KOTA BATU DAN KOTA PALU

Muhammad Riski Nugraha

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Kota Palu.

Riska Ayu Fahrany

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Kota Palu.

Ratu Amanda Busman

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Kota Palu.

Nuraisyah

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Kota Palu.

Syarif permana Salingkat

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Kota Palu.

Gita Farista

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Kota Palu.

Email: rizkystrip25@gmail.com

Abstrak : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis yang berperan besar dalam menyerap tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas aktivitas ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap perkembangan, karakteristik, dan tantangan UMKM di Kota Batu dan Kota Palu sebagai dua wilayah dengan konteks sosial-ekonomi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif dengan menggabungkan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Kota Batu didominasi oleh sektor pariwisata, kuliner, dan agrowisata dengan dukungan kuat dari pemerintah daerah melalui program pembinaan dan promosi digital. Sementara itu, UMKM di Kota Palu lebih berfokus pada sektor perdagangan, jasa, dan produksi rumahan, namun menghadapi tantangan pemulihan pascabencana serta keterbatasan akses modal. Temuan penelitian menegaskan bahwa perbedaan struktur ekonomi, kebijakan daerah, serta kapasitas adaptasi pelaku UMKM turut memengaruhi tingkat perkembangan UMKM di kedua kota. Penelitian ini memberikan gambaran penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik wilayah.

Kata Kunci: UMKM, analisis komparatif, Kota Batu, Kota Palu, kebijakan daerah, pengembangan usaha.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, tetapi juga berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi, penciptaan inovasi, serta penguatan ketahanan ekonomi daerah. Di berbagai wilayah Indonesia, UMKM

menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi dinamika global, ketidakpastian ekonomi, dan kondisi krisis. Keberadaan UMKM yang tersebar secara luas menjadikan sektor ini mampu bertahan dalam situasi sulit, termasuk saat terjadinya pandemi, bencana alam, maupun tekanan inflasi. Dengan melihat peran vital tersebut, analisis mengenai perkembangan dan tantangan UMKM di berbagai wilayah menjadi penting untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kota Batu dan Kota Palu merupakan dua wilayah yang memiliki karakteristik berbeda baik dari segi geografis, sosial, maupun struktur ekonomi. Kota Batu yang terletak di Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai kota wisata dan agrowisata yang berkembang pesat. Pertumbuhan sektor pariwisata secara langsung mendorong munculnya berbagai UMKM yang bergerak di bidang kuliner, kerajinan, penginapan, hingga produk-produk pertanian. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat turut memperkuat daya saing UMKM di Kota Batu, terutama melalui promosi digital dan pengembangan destinasi wisata terpadu. Kondisi tersebut menciptakan ekosistem bisnis yang relatif kondusif sehingga UMKM dapat terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan pasar.

Berbeda dengan Kota Batu, Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan pengalaman bencana alam pada tahun 2018. Meskipun demikian, UMKM di Kota Palu tetap menunjukkan ketangguhan dalam pemulihan ekonomi lokal melalui berbagai sektor seperti perdagangan, jasa, produk rumah tangga, serta kuliner khas daerah. Pemerintah Kota Palu terus mendorong pemberdayaan UMKM pascabencana melalui penyediaan bantuan modal, pelatihan manajemen usaha, serta fasilitasi akses perizinan. Namun, dibandingkan Kota Batu, tantangan UMKM di Palu cenderung lebih kompleks, termasuk keterbatasan infrastruktur, akses pembiayaan, serta kapasitas digital masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang dapat memengaruhi kecepatan pertumbuhan UMKM di kedua kota tersebut.

Perbandingan antara UMKM di Kota Batu dan Kota Palu menarik untuk dikaji karena masing-masing memiliki keunggulan dan hambatan yang berbeda. Kota Batu menonjol dalam kekuatan sektor pariwisata yang memberikan ruang pasar lebih luas bagi UMKM, sementara Kota Palu memiliki potensi besar dalam sektor jasa dan perdagangan namun menghadapi tantangan pemulihan ekonomi. Analisis komparatif ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana faktor geografis, kebijakan pemerintah daerah, kapasitas pelaku usaha, serta kondisi sosial ekonomi memengaruhi perkembangan UMKM di dua wilayah yang berbeda karakter. Dengan memahami faktor pembeda ini, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih kontekstual untuk mendukung pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup bagaimana perbedaan struktur usaha UMKM di Kota Batu dan Kota Palu, bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan UMKM di kedua kota, serta bagaimana tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM dalam meningkatkan keberlanjutan usahanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan karakteristik UMKM di kedua kota, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pengembangan UMKM, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat daya saing UMKM di masing-masing wilayah.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan tercipta kontribusi akademik dalam bidang administrasi publik, khususnya terkait kebijakan pengembangan UMKM berbasis wilayah. Selain itu, hasil penelitian dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah, pelaku UMKM, lembaga pendamping usaha, dan pihak terkait lainnya dalam merancang strategi pemberdayaan yang lebih tepat dan berkelanjutan. UMKM sebagai sektor strategis membutuhkan dukungan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, sehingga perbandingan antara Kota Batu dan Kota Palu menjadi studi penting yang tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi daerah, tetapi juga menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan ekonomi yang berbasis karakteristik wilayah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep UMKM dalam Perspektif Administrasi Publik

Dalam perspektif administrasi publik, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipahami sebagai bagian dari sektor pembangunan ekonomi yang memerlukan dukungan kebijakan yang efektif, koordinatif, dan responsif. Administrasi publik memandang UMKM bukan hanya sebagai entitas bisnis kecil, melainkan sebagai instrumen pembangunan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM dianggap mampu memperkuat struktur ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat lokal, serta diversifikasi sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah pada berbagai level mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya UMKM melalui kebijakan, regulasi, dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam konteks regulasi, keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM memberikan definisi dan kriteria yang jelas, mencakup aspek kekayaan bersih, omzet tahunan, serta kategori usaha. Dari perspektif administrasi publik, pengaturan ini menjadi dasar untuk merancang kebijakan pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM secara terarah. Administrasi publik berperan dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif melalui pelayanan publik yang efisien, seperti perizinan usaha, akses pembiayaan, dan pembinaan manajerial. Konsep *governance* dalam administrasi publik juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan UMKM. Dengan demikian, UMKM tidak hanya dipandang sebagai subjek ekonomi, tetapi juga objek kebijakan publik yang membutuhkan intervensi pemerintah berdasarkan prinsip *good governance*.

Selain itu, perspektif administrasi publik juga menilai UMKM sebagai aktor penting dalam mengatasi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Melalui pemberdayaan UMKM, pemerintah dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. UMKM memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan memiliki peran signifikan dalam menggerakkan ekonomi berbasis lokal. Oleh karena itu, pengembangan UMKM merupakan bagian integral dari agenda pembangunan nasional dan daerah, terutama dalam kerangka desentralisasi yang memberikan ruang otonomi bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi ekonominya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik dari aspek internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas manajerial pelaku usaha, keterampilan tenaga kerja, modal usaha, inovasi produk, dan penggunaan teknologi. Pelaku UMKM yang memiliki kemampuan manajerial baik cenderung lebih mampu mengembangkan strategi pemasaran, meningkatkan kualitas produk, serta mengelola keuangan secara efektif. Inovasi juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing UMKM di tengah perubahan preferensi konsumen dan persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Faktor eksternal mencakup dukungan pemerintah, akses terhadap pembiayaan, kondisi pasar, infrastruktur, penggunaan teknologi digital, dan lingkungan regulasi. Pemerintah berperan penting dalam menciptakan kebijakan yang memfasilitasi pengembangan UMKM melalui program pelatihan, bantuan pembiayaan, promosi usaha, dan penyederhanaan perizinan. Akses terhadap modal merupakan salah satu tantangan terbesar bagi UMKM, terutama di daerah yang kapasitas lembaga keuangannya masih terbatas. Ketersediaan modal yang cukup memungkinkan UMKM melakukan ekspansi usaha, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jaringan pemasaran.

Selain itu, faktor teknologi dan digitalisasi semakin signifikan dalam menentukan keberhasilan UMKM. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan pelaku usaha memperluas jangkauan pasar melalui e-commerce, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperbaiki strategi pemasaran. Namun demikian, tidak semua UMKM mampu beradaptasi dengan perubahan ini karena keterbatasan literasi digital, akses internet, dan fasilitas teknologi. Faktor lainnya adalah kondisi infrastruktur seperti transportasi dan pasar fisik yang memengaruhi kemudahan distribusi produk.

Konteks sosial dan budaya juga memengaruhi perkembangan UMKM. Di daerah yang memiliki tradisi lokal kuat, UMKM berbasis kearifan lokal dapat berkembang lebih cepat karena memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Sementara itu, daerah yang sering mengalami bencana atau gejolak sosial mungkin menghadapi hambatan besar yang menghambat proses produksi dan distribusi barang. Dalam perspektif administrasi publik, semua faktor ini perlu dianalisis secara komprehensif agar kebijakan pengembangan UMKM dapat dirancang secara adaptif sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

3. Model Perbandingan Wilayah dalam Analisis Kebijakan

Analisis perbandingan wilayah merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam administrasi publik untuk melihat bagaimana kebijakan atau fenomena tertentu berkembang dalam konteks geografis dan sosial ekonomi yang berbeda. Dalam konteks UMKM, analisis komparatif antarwilayah digunakan untuk memahami bagaimana potensi ekonomi, dukungan institusional, serta karakteristik masyarakat memengaruhi perkembangan UMKM. Model perbandingan wilayah menekankan bahwa setiap daerah memiliki kapasitas dan tantangan berbeda sehingga kebijakan yang diterapkan tidak dapat disamaratakan.

Model ini mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, aspek struktural, yakni kondisi ekonomi daerah, tingkat urbanisasi, potensi sumber daya, dan struktur pasar. Kedua, aspek kelembagaan, yaitu peran pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, kapasitas birokrasi, dan kolaborasi antar-stakeholder. Ketiga, aspek sosial budaya, termasuk nilai-nilai lokal, pola konsumsi, serta tingkat partisipasi

masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Analisis komparatif UMKM menjadi relevan karena UMKM sangat dipengaruhi oleh struktur lokal yang unik.

Dalam administrasi publik, model perbandingan wilayah sering digunakan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadaptasi oleh daerah lain. Misalnya, keberhasilan Kota Batu dalam mendorong UMKM berbasis pariwisata dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang memiliki potensi serupa. Sebaliknya, tantangan UMKM di daerah rawan bencana seperti Palu dapat menjadi dasar bagi penguatan strategi ketangguhan ekonomi daerah (*economic resilience*). Melalui analisis komparatif, pemerintah dapat melihat perbedaan efektivitas kebijakan dalam konteks yang berbeda sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih responsif terhadap kebutuhan wilayah.

Pendekatan ini juga memungkinkan pembuat kebijakan memahami dampak desentralisasi terhadap pengembangan UMKM. Di era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam menyusun program pembinaan UMKM. Oleh karena itu, perbandingan wilayah dapat mengungkap sejauh mana kelembagaan daerah mempengaruhi keberhasilan program-program pengembangan UMKM. Dengan memahami perbedaan tata kelola di masing-masing daerah, penelitian mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, berbasis data, dan sesuai konteks lokal.

4. Penelitian Terdahulu

a. Penelitian Terdahulu Kota Batu

- 1) “Dinamika Ruang Usaha pada Kampung UMKM: Studi Kasus Dusun Rejoso, Kota Batu” Fernanda Ayuning Putri (tesis, 2023)

Metode: studi kasus kualitatif (tesis universitas).

Temuan utama: fokus pada bagaimana penataan ruang usaha dan akses wisata meningkatkan visibilitas produk UMKM lokal; peran komunitas dan pemangku kebijakan lokal signifikan dalam pembentukan ekosistem usaha berbasis wisata.

- 2) “Peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu” — Begawan Haryo Pamungkas

Metode: kajian kebijakan + observasi.

Temuan utama: program pembinaan dan fasilitas sentra oleh-oleh serta dukungan infrastruktur pariwisata mendorong pertumbuhan UMKM; namun perlu peningkatan akses modal dan digitalisasi untuk memperkuat daya saing.

- 3) “Strategi Pengembangan UMKM Kota Batu Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan” — penelitian terapan (2024)

Metode: survei dan analisis strategi.

Temuan utama: rekomendasi strategi meliputi penguatan branding pariwisata, pembinaan digital marketing, serta pengembangan klaster produk (apel/agrowisata). Menekankan transfer praktik terbaik bagi UMKM lain.

b. Penelitian Terdahulu Kota Palu

- 1) “Peran Pemerintah Kota Palu dalam Memberdayakan UMKM di Kota Palu” — (artikel/penelitian, sumber FISIP UNTAD)

Metode: evaluatif (kualitatif kuantitatif terbatas).

Temuan utama: pemerintah melakukan berbagai intervensi pascabencana (bantuan modal, pelatihan), namun efektivitas program terkendala infrastruktur dan kapasitas adaptasi UMKM; perlunya program yang terintegrasi dan berkelanjutan.

- 2) “Upaya Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja Kota Palu dalam Memajukan UMKM” — M. Rafiq (skripsi/tesis, repo IAIN Palu)

Metode: studi kebijakan lokal + wawancara stakeholder.

Temuan utama: intervensi pemerintah lokal berdampak positif pada akses pasar dan pembinaan, tetapi akses pembiayaan formal dan literasi digital masih menjadi kendala utama.

- 3) “Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Digital terhadap Keberlangsungan Usaha Kuliner di Kecamatan Palu Barat” — W. Yanti (2022)

Metode: kuantitatif (survei).

Temuan utama: inklusi keuangan dan literasi digital berpengaruh signifikan positif terhadap keberlangsungan usaha; merekomendasikan peningkatan program inklusi keuangan dan pelatihan digital.

5. Kerangka Pemikiran (Conceptual Framework)

a. Tujuan kerangka

Menjelaskan hubungan antara faktor-faktor input (dukungan pemerintah, akses modal, infrastruktur, literasi digital, kapasitas manajerial) terhadap perkembangan UMKM sebagai variabel terikat, sekaligus memasukkan kondisi kontekstual (pariwisata, bencana) sebagai variabel moderator.

b. Variabel dan indikator operasional

- Variabel Independen (X):
- Dukungan Pemerintah (X1): program pembinaan, fasilitas sentra, subsidi/pelatihan.
- Akses Modal (X2): ketersediaan kredit mikro, inklusi keuangan.
- Infrastruktur & Pasar (X3): akses jalan, fasilitas pasar, kedekatan wisata.
- Literasi Digital & Teknologi (X4): penggunaan e-commerce, kemampuan pemasaran digital.
- Kapasitas Manajerial Pelaku (X5): pengetahuan usaha, pencatatan keuangan, inovasi produk.
- Variabel Terikat (Y): Perkembangan UMKM — diukur melalui: omzet/pendapatan, pertumbuhan skala usaha (tenaga kerja), akses pasar baru (online/offline), keberlanjutan usaha.
- Variabel Moderator (M): Karakteristik wilayah — (M1) Status pariwisata tinggi (Batu) vs. non-pariwisata/terdampak bencana (Palu); (M2) Tingkat kerentanan pascabencana.

c. Model hubungan (deskripsi)

- $X1-X5 \rightarrow Y$ (pengaruh langsung)

- M memoderasi pengaruh X terhadap Y: misalnya, dukungan pemerintah (X1) mempunyai efek lebih kuat di daerah pariwisata (Batu) karena sinergi pasar wisata; akses modal (X2) mungkin lebih kritis di Palu karena kebutuhan pemulihan pascabencana.
- d. Hipotesis yang dapat diuji
- H1: Dukungan pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM.
 - H2: Akses modal berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM.
 - H3: Literasi digital memperkuat pengaruh dukungan pemerintah terhadap perkembangan UMKM.
 - H4: Karakteristik wilayah (pariwisata vs. pascabencana) memoderasi hubungan antara faktor-faktor dukungan dan perkembangan UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif untuk menganalisis perbedaan karakteristik, tantangan, dan strategi pengembangan UMKM di Kota Batu dan Kota Palu. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena UMKM di dua wilayah yang memiliki kondisi geografis, struktur ekonomi, dan pola pembangunan yang berbeda. Penelitian komparatif memungkinkan peneliti mengidentifikasi faktor-faktor pembeda yang memengaruhi perkembangan UMKM serta mengungkap kelebihan dan kelemahan masing-masing daerah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik komparatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami realitas UMKM berdasarkan perspektif pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan dokumen kebijakan daerah. Metode deskriptif membantu menggambarkan secara sistematis kondisi aktual UMKM, sedangkan metode komparatif digunakan untuk membandingkan pola kebijakan, faktor pendukung, serta hambatan UMKM di Kota Batu dan Kota Palu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di:

- a. Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, yang dikenal sebagai kota pariwisata dengan basis UMKM kuat pada sektor kuliner, agribisnis, dan kerajinan.
- b. Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang sedang dalam masa pemulihan pascabencana dan memiliki perkembangan UMKM pada sektor perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga.

Pemilihan kedua wilayah didasarkan pada variasi kondisi sosial-ekonomi yang memungkinkan analisis perbandingan yang lebih komprehensif.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri atas:

- a. Data Primer, diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM, dinas terkait (Dinas Koperasi & UMKM), serta observasi lapangan mengenai aktivitas usaha.
- b. Data Sekunder, meliputi laporan resmi pemerintah daerah, publikasi BPS, jurnal ilmiah, buku teks, dokumen RPJMD, peraturan terkait UMKM, serta laporan penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah:

- a. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Dilakukan kepada:

- Pelaku UMKM di Batu dan Palu
- Pejabat Dinas Koperasi dan UMKM
- Tokoh masyarakat atau pihak terkait lainnya

Wawancara bersifat semi-terstruktur untuk mendapatkan data yang fleksibel namun tetap terarah.

- b. Observasi Lapangan

Meliputi pengamatan terhadap:

- Kondisi lingkungan usaha
- Ketersediaan sarana-prasarana
- Pola aktivitas produksi dan distribusi
- Dukungan pemerintah setempat

- c. Dokumentasi

Meliputi pengumpulan data berupa:

- Laporan statistik UMKM
- Dokumen kebijakan daerah
- Data demografi dan ekonomi

- d. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman yang terdiri dari:

1. Reduksi Data

Data dari lapangan dipilah, dikategorikan, dan disederhanakan sesuai fokus penelitian (kondisi UMKM, faktor pendukung/penghambat, perbedaan antarwilayah).

2. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk narasi, tabel komparatif, dan uraian tematik untuk memudahkan penarikan makna.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dilakukan secara bertahap, diverifikasi dengan data pendukung, serta dikaitkan dengan teori yang digunakan.

e. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui:

- Triangulasi sumber (pelaku usaha, pemerintah, dokumen)
- Triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumentasi)
- Member checking, yaitu verifikasi informasi kepada informan terkait
- Peer debriefing, meminta ulasan dari rekan peneliti atau akademisi.

f. Informan Penelitian

Penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kompetensi dan relevansi dengan topik. Informan utama terdiri dari:

- 10 pelaku UMKM di Kota Batu
- 10 pelaku UMKM di Kota Palu
- 2 pejabat dinas UMKM dari masing-masing daerah
- 2 pendamping UMKM atau pihak terkait lainnya

Jumlah dapat berkembang sesuai kebutuhan data.

g. Prosedur Penelitian

1. Pra-lapangan: studi literatur, penyusunan instrumen wawancara
2. Pengumpulan data di lokasi penelitian
3. Pengolahan dan analisis data
4. Penyusunan laporan dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum UMKM di Kota Batu

Kota Batu merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata di Provinsi Jawa Timur. Sebagai kota yang dikenal dengan ikon wisata alam, agro, serta rekreasi, perkembangan sektor UMKM di Kota Batu sangat dipengaruhi oleh dinamika industri pariwisata tersebut. UMKM di Batu umumnya berkembang pada sektor kuliner, kerajinan tangan, oleh-oleh, agribisnis, serta jasa pendukung pariwisata seperti penginapan, transportasi lokal, dan persewaan peralatan wisata. Berdasarkan data pemerintah daerah, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian kota, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.

Karakteristik UMKM di Kota Batu cenderung dipengaruhi oleh potensi wilayah yang subur dan memiliki komoditas unggulan seperti apel, stroberi, sayur-mayur, serta tanaman hortikultura lainnya. Banyak UMKM yang memproduksi olahan apel seperti keripik, sari buah, dodol, dan cider. Produk ini tidak hanya menjadi ciri khas Kota Batu, tetapi juga berperan dalam mendorong rantai nilai (*value chain*) antara petani, pengolah, dan pelaku penjualan. Industri kerajinan tangan, seperti souvenir kayu, keramik, dan produk kreatif lainnya juga berkembang karena pasar wisata yang stabil.

Selain sektor produksi, UMKM berbasis jasa seperti homestay, restoran, kafe tematik, dan persewaan kendaraan meningkat secara pesat. Pola konsumsi wisatawan terhadap pengalaman kuliner dan rekreasi memberikan peluang besar bagi UMKM untuk terus berinovasi. Pemerintah Kota Batu juga aktif mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai program, seperti pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, akses pembiayaan, serta fasilitasi pameran. Kehadiran berbagai pasar wisata, festival, dan event tahunan semakin menambah ruang promosi bagi UMKM lokal.

Namun, UMKM di Batu juga menghadapi beberapa tantangan internal. Pertama, sebagian pelaku masih memiliki keterbatasan literasi digital sehingga sulit memanfaatkan *e-commerce* secara optimal. Kedua, aspek manajemen usaha seperti pencatatan keuangan, pengendalian kualitas produk, dan pengemasan masih belum standar pada sebagian UMKM kecil. Ketiga, daya saing UMKM berbasis produksi sangat sensitif terhadap fluktuasi bahan baku, terutama bagi pelaku usaha olahan apel yang bergantung pada musim panen. Selain itu, kompetisi antar pelaku UMKM meningkat setiap tahun seiring bertambahnya wisatawan, sehingga inovasi produk menjadi kunci keberlanjutan.

Dari sisi regulasi, Pemerintah Kota Batu telah mencanangkan berbagai kebijakan pemberdayaan UMKM melalui kerja sama dengan dinas terkait, perbankan, serta lembaga pendamping UMKM. Program seperti Batu Go Digital, Kota Wisata Kreatif, dan pelatihan kewirausahaan mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk serta memperluas jaringan pemasaran. Secara umum, dinamika UMKM di Kota Batu menunjukkan perkembangan yang positif, ditopang oleh potensi wisata yang kuat, kreativitas masyarakat, dan dukungan kebijakan pemerintah.

2. Gambaran Umum UMKM di Kota Palu

Kota Palu, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibandingkan Kota Batu. Palu merupakan kota dengan struktur ekonomi yang ditopang oleh sektor perdagangan, jasa, dan industri kecil rumah tangga. Keberadaan UMKM di Kota Palu sangat krusial, terutama setelah kota ini mengalami bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi pada 2018 yang menyebabkan banyak sektor usaha mengalami penurunan. Dalam konteks pemulihan ekonomi, UMKM menjadi fokus utama karena kemampuannya untuk bangkit cepat serta menyerap tenaga kerja di tingkat lokal.

UMKM di Palu tersebar dalam berbagai bidang seperti makanan tradisional, konveksi, kerajinan berbahan dasar rotan dan kayu, industri rumah tangga, serta perdagangan retail. Produk makanan khas seperti kue bagea, sarabba, ikan asin, dan aneka olahan kelapa banyak diproduksi dalam skala kecil hingga menengah. Selain itu, sektor jasa seperti warung makan, laundry, percetakan, serta layanan transportasi online berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat urban.

Salah satu karakter khas UMKM Palu adalah dominasi usaha keluarga. Banyak pelaku UMKM menjalankan usaha dari rumah dengan modal terbatas dan jaringan pemasaran yang masih sederhana. Meski demikian, kreativitas masyarakat Palu dalam mengembangkan produk lokal mulai meningkat, terutama pascapemulihan ekonomi. Pemerintah Kota Palu bersama Dinas Koperasi dan UMKM terus mendorong pelaku usaha agar meningkatkan kualitas produksi melalui pelatihan, bantuan modal, dan program penguatan kelembagaan koperasi.

Tantangan utama UMKM di Palu berada pada aspek permodalan dan akses pasar. Banyak pelaku usaha masih kesulitan mendapatkan pembiayaan karena keterbatasan jaminan atau belum memiliki legalitas usaha. Infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih pascabencana juga mempengaruhi distribusi barang dan stabilitas pasokan bahan baku. Selain itu, UMKM Palu masih menghadapi hambatan dalam pemasaran digital karena kemampuan penggunaan teknologi yang tidak merata. Berbeda dengan Kota Batu yang didukung oleh pariwisata, pasar UMKM Palu lebih bergantung pada permintaan lokal sehingga pertumbuhan usaha cenderung fluktuatif.

Pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai lembaga telah meluncurkan sejumlah program pemulihan UMKM, seperti bantuan modal, fasilitasi perizinan melalui OSS, pelatihan digital marketing, dan pendampingan koperasi. Selain itu, adanya dukungan program pemulihan nasional (PEN) dan bantuan usaha mikro turut mempercepat kebangkitan UMKM pasca krisis. Perkembangan e-commerce juga mulai dimanfaatkan oleh beberapa UMKM Palu untuk memperluas jangkauan pasar ke luar daerah.

3. Perbandingan Struktur Usaha dan Jenis UMKM

Struktur usaha UMKM di Kota Batu dan Kota Palu menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan berdasarkan karakteristik wilayah, sumber daya lokal, serta pola perkembangan ekonomi masing-masing daerah. Kota Batu merupakan daerah dengan basis ekonomi pariwisata, sehingga struktur UMKM sangat dipengaruhi oleh keberadaan wisatawan sebagai pasar utama. UMKM di Batu banyak bergerak pada sektor kuliner, kerajinan, agrowisata, industri olahan hasil pertanian terutama apel, stroberi, sayuran dataran tinggi serta usaha berbasis jasa wisata seperti homestay, kafe tematik, taman wisata, hingga persewaan kendaraan. Dengan demikian, struktur UMKM di Batu memiliki kecenderungan kreatif, berorientasi pasar wisata, dan cenderung mengikuti tren inovasi.

Sementara itu, struktur UMKM di Kota Palu bersifat lebih heterogen, namun tidak terlalu bergantung pada wisata sebagai roda utama ekonominya. Palu adalah pusat perdagangan dan jasa di Sulawesi Tengah, sehingga UMKM didominasi oleh usaha perdagangan retail, makanan rumahan, kerajinan tradisional (rotan, kayu), konveksi kecil, jasa percetakan, serta industri rumah tangga. UMKM Palu umumnya bersifat kebutuhan dasar masyarakat setempat (market-driven oleh penduduk lokal), berbeda dengan UMKM Batu yang market-driven oleh wisatawan.

Perbedaan lain terlihat pada skala usaha. UMKM di Batu banyak berkembang menjadi usaha mikro dan kecil yang secara bertahap naik kelas menjadi usaha menengah karena pertumbuhan permintaan dari wisatawan yang cukup stabil. Banyak UMKM Batu yang sudah memiliki label izin PIRT, sertifikasi halal, hingga izin edar BPOM untuk skala tertentu. Hal ini menunjukkan tingginya dorongan untuk standar kualitas produk.

Di Palu, struktur usaha lebih banyak didominasi oleh usaha mikro keluarga dengan pola produksi sederhana. Meski ada juga usaha menengah, jumlahnya tidak sebesar di Kota Batu. Banyak UMKM Palu yang belum memiliki perizinan lengkap karena keterbatasan literasi administrasi dan modal. Selain itu, UMKM Palu lebih fokus pada pemulihan usaha pascabencana sehingga banyak pelaku usaha yang kembali memulai dari skala kecil.

Dari sisi variasi produk, UMKM Batu unggul pada produk oleh-oleh, kuliner inovatif, dan kerajinan kreatif yang banyak dipasarkan kepada wisatawan. Di Palu, variasi produk cenderung tradisional dan kebutuhan rumah tangga, meski belakangan mulai muncul inovasi terutama pada kuliner lokal serta kerajinan rotan yang memiliki ciri khas daerah.

4. Perbandingan Dukungan Pemerintah Daerah

Dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor kunci dalam perkembangan UMKM. Kota Batu dan Kota Palu memiliki pola dukungan yang berbeda karena kebutuhan dan karakter ekonomi masing-masing wilayah.

Pemerintah Kota Batu memberikan dukungan yang cukup kuat dan konsisten melalui Dinas Koperasi dan UMKM serta instansi terkait lainnya. Program utama pemerintah meliputi pelatihan pengembangan produk, pengemasan (packaging), pemasaran digital, akses pembiayaan melalui kerja sama dengan perbankan, serta penyediaan ruang pameran seperti Batu Tourism Center dan Galeri UMKM. Pemerintah juga aktif mengintegrasikan UMKM dalam event pariwisata seperti Batu Tourism Festival, Pasar Wisata, atau kegiatan BUMDes agrowisata. Sinergi antara sektor UMKM dan pariwisata menjadi ciri penting dukungan pemerintah dalam mendorong pemasaran dan ekspansi produk.

Selain itu, Kota Batu mendorong UMKM melalui program “Go Digital” yang membantu pelaku usaha masuk ke platform marketplace nasional, melatih pemasaran media sosial, serta memperluas jaringan distribusi. Ada pula pendampingan sertifikasi halal, PIRT, dan pembiayaan KUR bagi UMKM produktif. Dengan dukungan tersebut, UMKM Batu cenderung lebih cepat naik kelas.

Berbeda dengan Batu, dukungan Pemerintah Kota Palu lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan penguatan daya tahan usaha pascabencana. Pemerintah menjalankan program bantuan modal, pelatihan wirausaha pemula, pendampingan legalitas usaha melalui OSS, dan program penguatan koperasi untuk memperluas akses permodalan. Palu juga mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan lembaga donor internasional dalam rangka memulihkan UMKM yang terdampak bencana 2018.

Dukungan pemerintah daerah di Palu juga mencakup penyediaan fasilitas pelatihan kewirausahaan, bantuan alat produksi, serta pendampingan untuk pemasaran digital. Namun, intensitas dukungan pemasaran berbasis event seperti di Batu tidak sebesar itu karena struktur ekonomi Palu yang tidak berorientasi wisata.

Jika dibandingkan, program Batu lebih strategis dalam menciptakan ekosistem UMKM yang berkembang dan inovatif karena dukungan tersebut selaras dengan sektor pariwisata yang menjadi motor utama ekonomi daerah. Di sisi lain, program Palu lebih menekankan aspek ketahanan ekonomi lokal, pemberdayaan usaha mikro keluarga, serta

pembangunan kembali jaringan produksi dan distribusi yang sempat terputus pascabencana.

5. Perbandingan Tantangan UMKM di Kedua Kota

UMKM di Kota Batu dan Kota Palu menghadapi tantangan yang berbeda, meskipun beberapa tantangan bersifat umum bagi pelaku UMKM. Dalam konteks Batu, tantangan terbesar adalah ketergantungan terhadap sektor pariwisata. Ketika wisata menurun misalnya saat pandemi atau cuaca ekstrem pendapatan UMKM turun drastis. Selain itu, persaingan antar-UMKM meningkat karena banyak pendatang ikut membuka usaha. Tantangan lain meliputi keterbatasan inovasi pada sebagian pelaku, fluktuasi harga bahan baku hortikultura, serta belum meratanya kemampuan digital marketing.

UMKM Batu juga menghadapi tantangan dalam peningkatan kapasitas produksi karena sebagian pelaku masih mengandalkan peralatan sederhana. Beberapa UMKM produktif menghadapi kendala ketika ingin naik kelas karena terbatasnya pengetahuan tentang sertifikasi, perizinan lanjutan, atau ekspansi ke pasar lebih luas.

Sementara itu, UMKM di Kota Palu menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi pascabencana. Tantangan terbesar adalah keterbatasan modal dan aset usaha, karena banyak pelaku kehilangan fasilitas produksi akibat bencana 2018. Infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih juga mempengaruhi distribusi barang dan kestabilan usaha. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan literasi digital dan administrasi usaha, sehingga UMKM sulit bersaing dalam pemasaran online.

Pelaku UMKM Palu juga masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan karena kurangnya jaminan dan legalitas usaha. Kondisi pasar yang lebih sempit dibanding Kota Batu menyebabkan pertumbuhan usaha tidak stabil, tergantung daya beli masyarakat lokal. Tantangan lain adalah kurangnya standarisasi kualitas produk dan keterampilan inovasi.

Jika dibandingkan, tantangan UMKM Batu bersifat kompetitif bagaimana meningkatkan inovasi, kualitas, dan daya saing di tengah persaingan dan pasar wisata sedangkan tantangan UMKM Palu lebih bersifat struktural, terkait pemulihan, modal, infrastruktur, dan kapasitas usaha dasar.

6. Analisis Kebijakan: Efektivitas Program Pembinaan UMKM

Program pembinaan UMKM di tingkat pemerintah daerah memainkan peran strategis dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha, meningkatkan daya saing produk, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Efektivitas kebijakan pembinaan UMKM di Kota Batu dan Kota Palu dapat dianalisis melalui empat aspek utama: kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan UMKM, kualitas implementasi program, keterjangkauan dan aksesibilitas, serta dampaknya terhadap perkembangan usaha.

Di Kota Batu, kebijakan pembinaan UMKM menunjukkan tingkat efektivitas yang relatif tinggi, karena dirancang selaras dengan visi daerah sebagai kota wisata. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Koperasi, UKM, dan instansi pariwisata menerapkan program pembinaan yang komprehensif, mulai dari pelatihan manajemen usaha, pelatihan pemasaran digital, penguatan branding, fasilitasi legalitas usaha, hingga pengembangan jaringan pemasaran melalui event wisata. Pendekatan ini efektif karena

menjawab kebutuhan utama UMKM Batu: peningkatan kualitas produk, inovasi, dan akses pasar wisatawan.

Program “Batu Go Digital” misalnya, berhasil membantu banyak pelaku UMKM masuk ke pasar nasional melalui e-commerce, sehingga meningkatkan volume penjualan dan memperluas jaringan pemasaran. Pemerintah juga menyediakan ruang pameran, festival UMKM, dan integrasi UMKM dalam event pariwisata, sehingga promosi produk lebih terarah. Keberhasilan program ini terlihat dari meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha, sertifikasi halal, izin PIRT, dan kemasan produk yang lebih standar. Kemitraan dengan perbankan melalui KUR juga meningkatkan akses modal bagi pelaku usaha yang ingin naik kelas.

Sementara itu, efektivitas program pembinaan UMKM di Kota Palu bersifat unik karena fokus utama kebijakannya adalah pemulihan ekonomi pascabencana. Pemerintah Kota Palu memberikan perhatian besar pada bantuan permodalan, pengadaan alat produksi, pendampingan legalitas, serta pelatihan dasar kewirausahaan. Program-program ini efektif dalam membantu UMKM kembali berdiri dan memulai usaha setelah kehilangan aset akibat gempa dan likuefaksi tahun 2018. Dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga internasional juga menambah kapasitas pembinaan, terutama dalam peningkatan ketahanan usaha (*resilience building*).

Namun, efektivitas program pembinaan di Palu masih menghadapi hambatan struktural. Beberapa UMKM tidak dapat mengakses pembiayaan karena minimnya jaminan; literasi digital juga belum merata sehingga pemasaran online sulit dilakukan. Selain itu, program pelatihan sering kali bersifat umum, tidak spesifik pada kebutuhan sektor tertentu, sehingga manfaatnya kurang maksimal. Pemerintah daerah telah berupaya memperluas akses pelatihan dan menjalin kerja sama dengan marketplace, tetapi keterbatasan infrastruktur dan daya serap program masih menjadi kendala.

Bila dibandingkan, efektivitas program pembinaan UMKM di Kota Batu lebih kuat dalam aspek peningkatan kapasitas dan ekspansi pasar, sedangkan di Palu lebih efektif dalam membantu pemulihan dan stabilisasi usaha mikro. Perbedaan ini mencerminkan konteks lokal: Batu berfokus pada pertumbuhan dan inovasi; Palu berfokus pada pemulihan, pemberdayaan dasar, dan penguatan ketahanan ekonomi.

7. Diskusi Temuan Penelitian

Temuan penelitian mengenai perbandingan UMKM di Kota Batu dan Kota Palu memberikan gambaran bahwa perkembangan UMKM sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah, dukungan kebijakan, serta kondisi sosial dan geografis. Diskusi temuan ini mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana dua kota dengan karakteristik berbeda membangun ekosistem UMKM masing-masing.

Temuan pertama menunjukkan bahwa struktur usaha UMKM Kota Batu lebih berorientasi pada pariwisata, sedangkan UMKM Palu lebih berorientasi pada kebutuhan lokal dan pemulihan ekonomi. Hal ini terlihat dari jenis usaha dominan: Batu didominasi kuliner wisata, oleh-oleh, kerajinan kreatif, dan agrowisata; Palu didominasi perdagangan kecil, makanan lokal, industri rumahan, dan kerajinan tradisional. Perbedaan ini menegaskan bahwa konteks keberadaan pasar sangat menentukan arah perkembangan UMKM. Batu yang memiliki permintaan wisatawan cenderung menghasilkan UMKM

kreatif; sementara Palu yang mengandalkan konsumsi lokal memiliki UMKM yang lebih bersifat kebutuhan dasar.

Temuan kedua terkait dukungan pemerintah menunjukkan perbedaan fokus kebijakan antara kedua kota. Pemerintah Kota Batu lebih menekankan program peningkatan kualitas produk, pemasaran digital, inovasi, serta integrasi UMKM dengan sektor pariwisata. Sementara itu, Pemerintah Kota Palu lebih fokus pada pemulihan pascabencana, bantuan modal, pelatihan dasar, dan penguatan koperasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik harus adaptif terhadap realitas sosial dan ekonomi lokal. Kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang menyesuaikan diri terhadap tantangan spesifik wilayah.

Temuan ketiga berkaitan dengan tantangan UMKM. Batu menghadapi tantangan yang lebih bersifat kompetitif, yaitu inovasi produk, digitalisasi, persaingan tinggi, dan fluktuasi pasar wisata. Sebaliknya, tantangan di Palu bersifat struktural: minimnya modal, keterbatasan infrastruktur, literasi digital rendah, dan pasar yang belum stabil. Analisis ini menunjukkan bahwa pembangunan kapasitas UMKM tidak bisa disamaratakan; setiap daerah membutuhkan pendekatan berbeda sesuai karakteristik tantangan yang dihadapi.

Temuan keempat menyangkut efektivitas program pembinaan UMKM. Program di Batu menunjukkan efektivitas tinggi dalam mendorong UMKM naik kelas, sementara di Palu program pembinaan efektif dalam membantu pemulihan usaha namun masih menghadapi hambatan implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh keterpaduan program, dukungan anggaran, dan kesiapan pelaku usaha sebagai penerima manfaat.

Terakhir, temuan ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan UMKM di masa depan. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan tiga pendekatan: (1) pembangunan kapasitas pelaku UMKM, (2) intervensi pasar melalui promosi dan digitalisasi, dan (3) penguatan ekosistem melalui kerja sama multipihak (pemerintah-swasta-komunitas). Untuk Kota Batu, kebijakan inovasi dan diversifikasi produk menjadi agenda utama. Untuk Kota Palu, kebijakan stabilisasi ekonomi, perbaikan infrastruktur, dan penguatan permodalan menjadi prioritas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Kota Batu dan Kota Palu sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, struktur ekonomi lokal, serta efektivitas kebijakan pemerintah daerah. Kota Batu memiliki UMKM yang berorientasi pada sektor pariwisata, sehingga jenis usaha yang berkembang lebih inovatif, kreatif, dan terhubung dengan demand wisatawan. Sementara itu, UMKM di Kota Palu lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal dan fokus pada pemulihan ekonomi pascabencana. Dukungan pemerintah Kota Batu cenderung bersifat progresif dengan penekanan pada digitalisasi, peningkatan kualitas produk, serta event pariwisata; sedangkan dukungan pemerintah Kota Palu lebih berfokus pada bantuan modal, pemulihan usaha, peningkatan keterampilan dasar, dan penguatan koperasi. Perbedaan tantangan yang dihadapi UMKM di kedua kota menegaskan bahwa kebijakan pengembangan UMKM harus bersifat adaptif, kontekstual, dan spesifik sesuai kebutuhan daerah. Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa UMKM di kedua kota memiliki

potensi besar untuk berkembang apabila didukung oleh kebijakan yang tepat, ekosistem usaha yang kondusif, serta kolaborasi multipihak secara berkelanjutan.

SARAN

1. Pemerintah Kota Batu perlu terus memperkuat inovasi berbasis digital, meningkatkan kualitas sertifikasi produk, dan memperluas jejaring pemasaran UMKM melalui event kreatif yang lebih konsisten.
2. Pemerintah Kota Palu perlu meningkatkan akses permodalan melalui skema kredit yang lebih inklusif, menyediakan fasilitas produksi, serta mempercepat perbaikan infrastruktur pendukung UMKM.
3. Kedua kota perlu memperkuat kolaborasi lintas instansi, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk mengembangkan model pemberdayaan UMKM yang lebih berkelanjutan.
4. Pelaku UMKM di Batu dan Palu disarankan untuk meningkatkan literasi digital, mengadopsi model bisnis berbasis inovasi, dan mengikuti pelatihan manajemen usaha agar lebih adaptif terhadap perubahan pasar.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel, seperti analisis rantai pasok, peran koperasi, dan dinamika pasar digital, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pengembangan UMKM di berbagai daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan penelitian ini, khususnya kepada pelaku UMKM di Kota Batu dan Kota Palu yang bersedia memberikan informasi secara terbuka, serta kepada Dinas Koperasi dan UMKM di kedua kota atas ketersediaan data dan dukungan administratif. Terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, yang turut memberikan masukan berharga. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D., & Ramli, M. (2021). Penguatan kapasitas UMKM melalui digital marketing. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Indonesia*, 12(2), 145–157.
- Arianti, N. (2020). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM pascabencana. *Jurnal Kebijakan Publik Nusantara*, 5(1), 34–47.
- Budianto, A. (2019). Pengembangan UMKM berbasis potensi lokal. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dewi, K. T. (2022). Strategi inovasi UMKM berbasis pariwisata. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 6(3), 210–221.

- Ginting, S. & Lestari, D. (2020). Tantangan UMKM di era digital di Indonesia Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 9(1), 55–66.
- Hidayat, R. (2018). *Manajemen usaha kecil dan mikro*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, T. (2021). Analisis daya saing UMKM melalui peningkatan kualitas produk. *Jurnal Administrasi Bisnis Indonesia*, 8(2), 122–134.
- Laksmi, P., & Yanuar, A. (2023). Efektivitas program pembinaan UMKM oleh pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(1), 88–102.
- Mahmud, A. (2019). *Ekonomi kerakyatan dan UMKM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyani, R., & Arif, S. (2022). Implementasi kebijakan kredit usaha rakyat bagi UMKM. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 14(2), 101–115.
- Ningsih, D. (2019). Peran UMKM dalam pemulihan ekonomi daerah. *Jurnal Sosial dan Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 40–50.
- Putra, I. W. (2020). Pemberdayaan UMKM melalui penguatan kelembagaan koperasi. *Jurnal Perekonomian Rakyat*, 5(3), 98–110.
- Rahman, F. (2021). Dampak digitalisasi terhadap kinerja UMKM di kawasan wisata. *Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis*, 4(2), 67–79.
- Sukei, H. (2022). *Pengembangan model UMKM berkelanjutan di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Yusuf, M., & Ihsan, M. (2021). Analisis kendala UMKM di daerah pascabencana. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 3(4), 250–263.